



RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD) KABUPATEN KLATEN TAHUN 2025



Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom.
Bupati Klaten



H. Benny Indra Ardhiyanto, S.E., M.B.A.
Wakil Bupati Klaten

KLATEN BERSINAR : EKONOMI TUMBUH MERATA, PRESTASI MAKIN NYATA

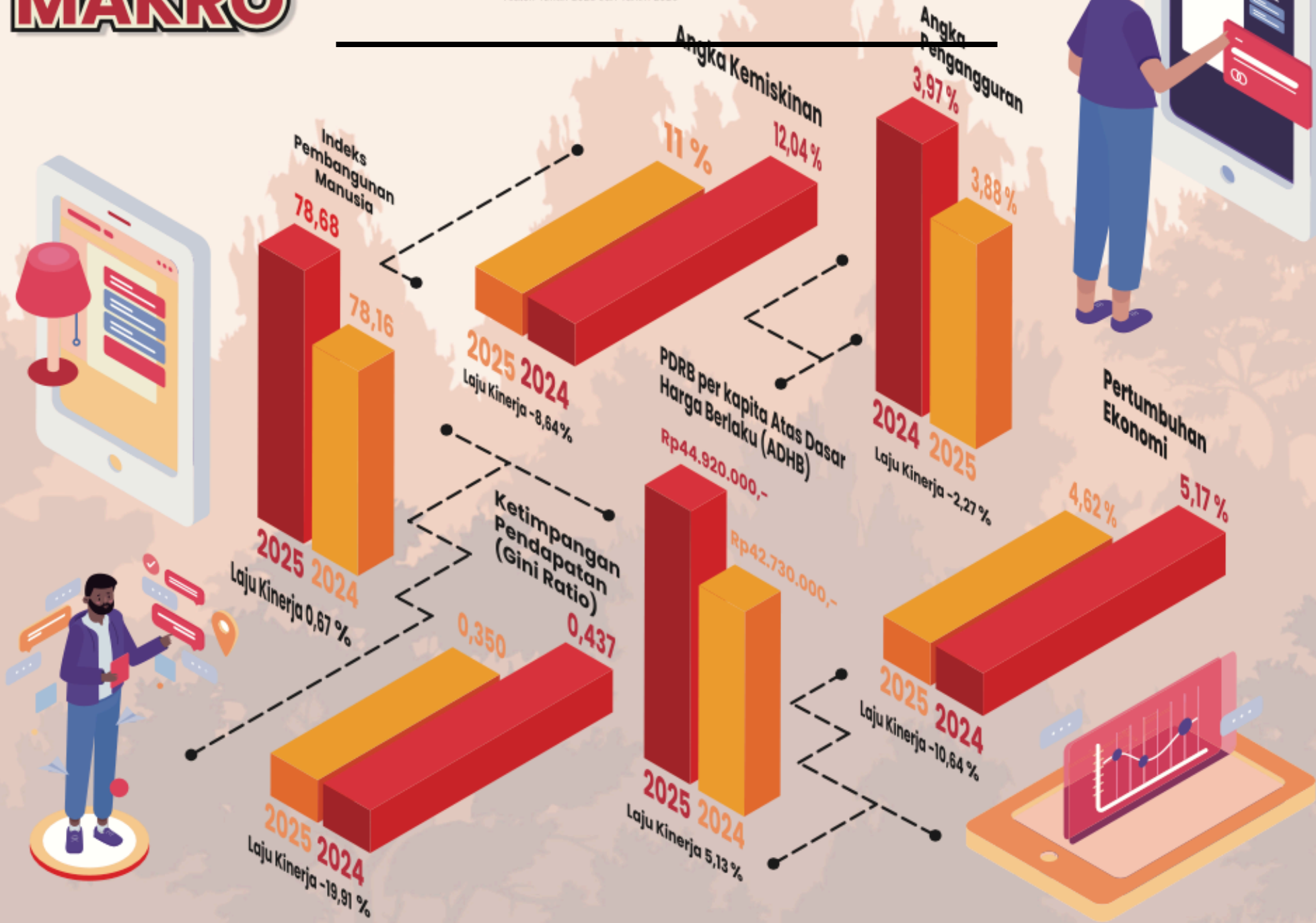
Menapaki satu tahun perjalanan kepemimpinan, di bawah nakhoda Bupati Klaten, arah kebijakan Kabupaten Klaten tahun 2025 yang berfokus pada "Peningkatan Kemandirian Daerah didukung Penguatan Daya Saing Ekonomi Lokal dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik" telah membuahkan hasil nyata. Salah satu indikator adalah keberhasilan pemerintah daerah dalam menciptakan pemerataan ekonomi, dan penguatan daya saing ekonomi lokal yang digenot melalui pemberdayaan UMKM dan optimalimalisasi potensi desa. Data BPS menunjukkan, Gini Ratio Kabupaten Klaten mengalami penurunan signifikan, dari angka 0,437 pada tahun 2024

menjadi 0,350 pada tahun 2025. Penurunan ini menjadi bukti konkret bahwa pertumbuhan ekonomi di Klaten kini jauh lebih inklusif dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, sehingga kesenjangan sosial kian menyempit. Investasi jangka panjang pada sektor kesehatan dan pendidikan juga menunjukkan tren positif. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Klaten tahun 2025 sebesar 78,68 berhasil melampaui rata-rata IPM tingkat Provinsi maupun Nasional. Di sektor birokrasi, komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berubah pengakuan nasional yang prestisius. Kabupaten Klaten

berhasil menorehkan tinta emas dengan meraih Peringkat ke-2 Nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) serta mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK. Prestasi ini mencerminkan tingginya standar transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik yang dijalankan. Keberhasilan ini juga diperkuat dengan torehan predikat "Sangat Inovatif" dalam Indeks Inovasi Daerah. Berbagai terobosan digital dan penyederhanaan layanan publik yang dikembangkan setahun terakhir membuktikan bahwa Klaten telah bertransformasi menjadi daerah yang adaptif terhadap perubahan zaman.

CAPAIAN KINERJA MAKRO

Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Tengah dan Kabupaten Klaten Tahun 2025 dan Tahun 2026



HASIL EPPD (EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH)

URAIAN	NILAI
EPPD TAHUN 2024 TERHADAP LPPD TAHUN 2023 (Peringkat 2 Nasional)	3,7508 (Status Kinerja Tinggi)

OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024

URAIAN	OPINI
OPINI BPK ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)

PENDAPATAN DAERAH

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	(%)
PENDAPATAN ASLI DAERAH	543.860.359.592	528.101.636.571	97,10
PENDAPATAN TRANSFER	2.282.089.777.972	2.329.170.688.464	102,06
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000	13.400.000.000	102,76
TOTAL PENDAPATAN DAERAH	2.838.990.137.564	2.870.672.325.035	101,11

BELANJA DAERAH

URAIAN	ANGGARAN 2025 (Rp)	REALISASI 2025 (Rp)	(%)
BELANJA OPERASI	2.166.811.790.444	1.891.553.526.262	87,29
BELANJA MODAL	242.629.550.734	185.757.329.976	76,56
BELANJA TIDAK TERDUGA	11.061.938.938	934.082.000	8,44
BELANJA TRANSFER	699.763.094.694	675.842.340.423	96,58
TOTAL BELANJA DAERAH	3.120.266.374.810	2.754.087.278.661	88,26

Sumber: BPPKPAD Kabupaten Klaten, data per 28 Februari 2026

Sumber: BPPKPAD Kabupaten Klaten, data per 28 Februari 2026

RINGKASAN CAPAIAN URUSAN PELAYANAN DASAR



PENDIDIKAN



- ▶ **99,59 %**
Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini
- ▶ **96,66 %**
Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar
- ▶ **97,29 %**
Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan
- ▶ **69,95 %**
Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik
- ▶ **79,31 %**
Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik

KESEHATAN



- ▶ **0,11 %**
Persentase kematian ibu
- ▶ **13,77 %**
Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar
- ▶ **100 %**
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar

INOVASI DAERAH TAHUN 2025

1. LAPOR MAS BUP.
2. Sekolah Interaktif Terpadu (SIT).
3. Sehatku Bagas Waras.
4. SIMANTARU (Sistem Informasi Pemanfaatan Penataan Ruang).
5. SIFASUM 2.0 (Sistem Informasi Fasilitas Umum).
6. Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di MPP dan di Kecamatan Berdaya.
7. Sistem Informasi Difabel (AKSIDIFA).
8. SIPUS (Sistem Informasi Pengurangan Sampah).
9. Layanan Adminduk Jemput Bola Terintegrasi Desa.
10. Pembuatan Website sejarah dan budaya Kabupaten Klaten: museum.klaten.go.id

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- ▶ **78,21 %**
Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir
- ▶ **53,55 %**
Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota
- ▶ **84,21 %**
Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota
- ▶ **95,50 %**
Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota
- ▶ **100 %**
Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- ▶ **100 %**
Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota
- ▶ **100 %**
Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah
- ▶ **100 %**
Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
- ▶ **65,20 %**
Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota



PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

- ▶ **100 %**
Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni
- ▶ **100 %**
Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani
- ▶ **14,16 %**
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani
- ▶ **100 %**
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum



KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

- ▶ **100 %**
Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku
- ▶ **100 %**
Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja
- ▶ **100 %**
Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan
- ▶ **100 %**
Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- ▶ **100 %**
Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- ▶ **83,68 %**
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran



SOSIAL

- ▶ **100 %**
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
- ▶ **100 %**
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
- ▶ **100 %**
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
- ▶ **100 %**
Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti
- ▶ **100 %**
Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar
- ▶ **100 %**
Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota



PENGHARGAAN/PRESTASI TAHUN 2025

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024.
- Penghargaan Peringkat 2 Nasional dalam Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD).
- Peringkat 5 Nasional STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) Award Tingkat Paripurna.
- Peringkat 7 Nasional Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) terbaik Kategori Kabupaten dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) Award 2025.
- Penghargaan Kabupaten Kota

- Sehat Swastisaba Padapa.
- Penghargaan Innovation Government Award (IGA) Kabupaten Sangat Inovatif Tahun 2025.
- Penghargaan Subroto Award Tahun 2025 kategori Mitigasi Bencana Geologi.
- Penghargaan Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten sebagai Tiga Instansi Terbaik Kategori Media On Ground Activation Pariwara Antikorupsi Tahun 2025.
- Penghargaan Kabupaten Layak Anak Tingkat Nindya.
- Penghargaan Harmony Award (Peringkat 1) kategori Program/Kegiatan Kerukunan Umat Beragama yang Inovatif.



Bupati Klaten



Hamenang Wajar Ismoyo, S.I.Kom.



BUPATI KLATEN

Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2025

A. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Klaten Tahun 2025 secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Capaian kinerja makro yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Makro Kabupaten Klaten Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja
1.	Indeks Pembangunan Manusia	78,16	78,68	0,67%
2.	Angka Kemiskinan	12,04%	11%	-8,64%
3.	Angka Pengangguran	3,97%	3,88%	-2,27%
4.	Pertumbuhan Ekonomi	5,17%	4,62%	-10,64%
5.	PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	Rp42.730.000,-	Rp44.920.000,-	5,13%
6.	Ketimpangan Pendapatan	0,437	0,350	-19,91%

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah dan BPS Kabupaten Klaten Tahun 2025 dan 2026

B. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian Kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk diantaranya :

1. Urusan Pendidikan

A. Capaian kinerja Urusan Pendidikan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	100,88%	99,59%
2.	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	n/a	96,66%
3.	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,95%	-
4.	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	98,56%	-
5.	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,32%	97,29%
6.	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	n/a	69,95%
7.	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	n/a	79,31%

Keterangan:

n/a : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

- : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator lama

B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp.911.350.408.262,- dengan program unggulan sebagai berikut:

Gebyar Inovasi Pendidikan III Tahun 2025 merupakan salah satu kegiatan unggulan yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten sebagai bentuk komitmen dalam mendorong peningkatan mutu pendidikan yang adaptif, kreatif, dan inovatif. Kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk menampilkan berbagai hasil karya dan inovasi dari satuan pendidikan, baik dari jenjang PAUD, SD, maupun SMP, yang mencerminkan implementasi pembelajaran berbasis kreativitas, teknologi, dan penguatan karakter peserta didik.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Belum terjalinnya koordinasi lintas perangkat daerah seperti Dispermasdes, Pemerintah Desa, Kecamatan dalam mendata Anak Tidak Sekolah (ATS);
- 2) Belum mampu memberikan bantuan beasiswa bagi siswa dari keluarga kurang mampu yang bersumber dari APBD;
- 3) Belum semua pendidik terutama pada jenjang PAUD yang memiliki kualifikasi pendidikan sarjana.

2. Urusan Kesehatan

- A. Capaian kinerja Urusan Kesehatan yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	1,52	-
2.	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100%	-
3.	Persentase kematian ibu	n/a	0,11%
4.	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	n/a	13,77%
5.	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	100%
6.	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	100%	100%
7.	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	100%
8.	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	100%
9.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	81,89%	100%
10.	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	96,68%	100%
11.	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	100%
12.	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	100%
13.	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	100%
14.	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%	100%
15.	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	100%
16.	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%	100%

Keterangan:

n/a : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

- : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator lama

B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp389.837.602.279,- dengan program unggulan sebagai berikut:

Pemeriksaan kesehatan gratis (PKG) dan Layanan Speling (Dokter Spesialis Keliling). Program pelayanan kesehatan langsung kepada masyarakat dengan bentuk layanan skrining dan konsultasi kesehatan secara gratis kepada masyarakat dengan tujuan mendekatkan akses layanan kesehatan dan meningkatkan deteksi dini terhadap penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Kesehatan di Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya kasus keracunan makanan di masyarakat
- 2) Masih adanya kasus kejadian Penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I)
- 3) Kelembagaan di tingkat Kecamatan dan Desa belum terselenggara secara maksimal dalam penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat (KKS)
- 4) Belum optimalnya skrining pada bayi baru lahir, misalnya Skrining Hipotiroid Kongenital (SHK) masih banyak sampel yang direject sehingga sampel tidak bisa diperiksa
- 5) Masih rendahnya capaian Pemeriksaan Kesehatan Gratis(PKG)

3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- A. Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0/1 (Surat Keterangan Sekda)	-
2.	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	n/a	78,21%
3.	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	0/1 (Surat Keterangan Sekda)	Tidak dapat dilaksanakan (Surat Keterangan Sekda)
4.	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	47,07%	53,55%
5.	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	84,01%	84,21%
6.	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di	94,25%	95,50%

	kabupaten/kota		
7.	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	100%	100%
8.	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100%	100%
9.	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	n/a	100%
10.	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	100%	100%
11.	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100%	-
12.	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	n/a	65,20%

Keterangan:

- n/a : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.
 - : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator lama

B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp155.769.345.967,- dengan program unggulan sebagai berikut:

Dalam Alus, Padang lan Banyu Lancar. Program ini difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur jalan, pengelolaan sumber daya air, serta penyediaan akses air minum layak bagi masyarakat. Melalui Program Penyelenggaraan Jalan, Pemerintah Daerah berupaya meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Selain itu, melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Air serta Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dilakukan penguatan jaringan irigasi dan peningkatan akses air bersih, sehingga diharapkan mampu mendukung kesejahteraan masyarakat, ketahanan pangan, dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Daya dukung dan kualitas air baku makin terbatas dan tidak semua desa memiliki sumber air baku.
- 2) Belum ada kerjasama Pemda dengan pihak swasta terkait pengelolaan air limbah domestik, diharapkan dengan kerjasama tersebut dapat memaksimalkan fungsi IPLT
- 3) Adanya perbedaan metode survey jalan menyebabkan penurunan persentase jalan kondisi mantap

4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- A. Capaian kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2.	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	0/1 (Surat Keterangan Sekda)	-
3.	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100%	100%
4.	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	2,44%	-
5.	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	n/a	14,16%
6.	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100%	100%

Keterangan:

n/a : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

- : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator lama

- B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp16.999.881.955,- dengan program unggulan sebagai berikut :

Hunian Layak Pelayanan Prima. Dalam rangka mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten berkomitmen menghadirkan program unggulan berbasis kebutuhan nyata masyarakat melalui slogan "Hunian Layak, Pelayanan Prima."

Program ini menitikberatkan pada penyediaan dan peningkatan kualitas hunian yang sehat, aman, dan berkelanjutan, sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang cepat, transparan, dan responsif

melalui berbagai intervensi strategis seperti:

- 1) Peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH),
- 2) Penataan kawasan permukiman kumuh,
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman,
- 4) Serta penguatan sistem pelayanan berbasis digital dan partisipatif.

- C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Klaten Tahun 2025

adalah sebagai berikut :

- 1) Masih terdapat kawasan kumuh di Kabupaten Klaten yang belum tertangani
- 2) Belum optimalnya penataan lingkungan kawasan permukiman
- 3) Belum optimalnya penanganan terhadap rumah bencana korban
- 4) Durasi penerbitan sertifikat tanah PSU perumahan dan permukiman

5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

A. Capaian kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	n/a	100%
2.	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	100%
3.	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	100%
4.	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-
5.	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%
6.	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	100%
7.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	83,33%	83,68%
8.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	15,97 menit	-

Keterangan:

n/a : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

- : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator lama

B. Realisasi Belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Realisasi belanja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp19.124.243.746,- dengan program unggulan sebagai berikut :

- 1) DAMKAR GOES TO SCHOOL. Program Damkar Goes To School ini bertujuan untuk mengenalkan profesi pemadam kebakaran dan

memberikan pengetahuan tentang proses pemadaman api kepada anak-anak usia dini, siswa-siswi dan Tenaga Pendidik. Program ini juga merupakan salah satu bentuk upaya Pemadam Kebakaran mensosialisasikan tentang bahaya kebakaran dan pencegahan dini kepada anak-anak usia dini, siswa-siswi dan Tenaga Pendidik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat.

- 2) JAMPI KUAT (Jagongan Lima Pilar Klatenku Tangguh Bencana). Dalam Mendukung 10 program prioritas Bupati Klaten yaitu Program ke-9 terkait Program insentif bagi Relawan) dengan cara Melakukan komunikasi secara intens kepada semua stakeholders kebencanaan. Komunikasi dilakukan dengan metode tatap muka, pelatihan bersama dan sarasehan dengan melibatkan semua stakeholders kebencanaan di Kabupaten Klaten dengan manfaat program:
 1. Meningkatkan peran serta stakeholders kebencanaan dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten
 2. Meningkatkan kapasitas masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten
 3. Memperkuat kerja sama stakeholders dalam upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Klaten

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Ketersediaan SDM Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten yang terbatas dibandingkan dengan luas wilayah kerja urusan ketentraman dan ketertiban umum 701,52 km² dengan 391 Desa/ 10 Kelurahan.
- 2) Belum optimalnya kompetensi aparatur/ Sumber Daya Manusia (SDM) dalam standar kompetensi penanggulangan bencana.

6. Urusan Sosial

A. Capaian kinerja Urusan Sosial yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Klaten pada Tahun 2025 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

No.	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025
1.	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	n/a	100%
2.	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	n/a	100%
3.	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	n/a	100%
4.	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	n/a	100%
5.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di	100%	-

	luar panti (Indikator SPM)		
6.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%
7.	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	n/a	100%

Keterangan:

n/a : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator baru.

- : Indikator Kinerja Kunci merupakan indikator lama

B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2025 sebesar Rp19.952.577.232,- dengan program unggulan sebagai berikut :

- 1) AKSIDIFA (Aplikasi Sistem Data & Informasi Difabel), merupakan program yang berfokus pada pengelolaan data, pelayanan, serta pemberdayaan penyandang disabilitas secara terintegrasi dan berkelanjutan. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan penyandang disabilitas melalui pendekatan berbasis data dan kemanusiaan, dengan mengedepankan prinsip inklusivitas, kemandirian, serta partisipasi aktif masyarakat. Aksidifa menjadi sarana strategis dalam menyediakan informasi yang akurat dan terpadu mengenai kondisi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, sehingga memudahkan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program sosial yang tepat sasaran.
- 2) PGTS (Peksos Goes To Schools) merupakan program unggulan DISSOSP3APPKB Kabupaten Klaten yang bertujuan meningkatkan perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui edukasi dan pendampingan langsung di sekolah. Program ini hadir sebagai respon atas semakin kompleksnya permasalahan anak, seperti bullying, klitih, pernikahan anak, hingga penyalahgunaan media sosial, yang dipengaruhi oleh faktor pengasuhan, sosial-ekonomi, dan budaya. Melalui peran Pekerja Sosial (Peksos), PGTS memberikan penyuluhan terkait hukum, kesehatan mental, dan penguatan karakter, sekaligus melakukan upaya preventif, promotif, dan kuratif sesuai amanat Undang-Undang Perlindungan Anak.

C. Permasalahan yang dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk Urusan Sosial di Kabupaten Klaten Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- 1) Sesuai Inpres Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) bagi setiap K/L, Provinsi dan Kabupaten/ Kota, maka Kabupaten harus menggunakan DTSEN sebagai satu-satunya sumber data dalam penanganan kemiskinan. Sementara itu DTSEN masih berproses untuk menjadi data yang valid karena terdapat data keluarga yang tidak sesuai kondisi yang sebenarnya

3. Hasil EPPD dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya

1. Hasil EPPD Tahun Sebelumnya Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7 – 2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023, Kabupaten Klaten berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan **skor kinerja 3,7508** dan **status kinerja Tinggi**. Hasil tersebut menempatkan Kabupaten Klaten pada **Peringkat 2 (dua) secara nasional** kategori Kabupaten.
2. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Sebelumnya Berdasarkan Laporan Nomor 134/S/XVIII.SMG/05/2025 tanggal 26 Mei 2025 perihal Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2024 Kabupaten Klaten berhasil mendapatkan **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)** Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2024 yang berarti sistem pengendalian internal sudah memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan dan secara keseluruhan laporan keuangan telah disajikan secara wajar sesuai Akuntansi Pemerintah. Atas capaian ini berarti Pemerintah Kabupaten Klaten telah mempertahankan Opini WTP sebanyak 7 (tujuh) kali berturut-turut.

4. Ringkasan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten (Unaudited) Tahun 2025 Realisasi Pendapatan Kabupaten Klaten Tahun 2025 mencapai sebesar Rp2.870.672.325.035,- dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 mencapai Rp2.754.087.278.661,-

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

KODE REKENING	JENIS PENDAPATAN	TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	543.860.359.592	528.101.636.571	97,10
4.1.01	Pajak Daerah	335.842.142.572	320.477.874.453	95,42
4.1.02	Retribusi Daerah	161.477.544.402	152.677.342.236	94,55
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.101.122.090	27.345.694.197	123,72
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	24.439.550.528	27.600.725.685	112,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.282.089.777.972	2.329.170.688.464	102,06
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.151.672.387.972	2.176.964.781.501	101,17
4.2.01.05	Dana Desa	370.427.124.000	358.159.295.584	96,68
4.2.01.06	Insentif Fiskal	15.877.103.000	15.877.103.000	100
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	51.611.210.000	50.791.190.700	98,41
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.250.541.105.000	1.289.741.377.020	103,13
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	463.215.845.972	462.395.815.197	99,82
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	130.417.390.000	152.205.906.963	116,70
4.2.02.01	Pendapatan bagi hasil	123.776.390.000	147.485.148.963	119,15
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	6.641.000.000	4.720.758.000	71,08
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	13.040.000.000	13.400.000.000	102,76

4.3.01	Pendapatan Hibah	13.040.000.000	13.400.000.000	102,76
PENDAPATAN		2.838.990.137.564	2.870.672.325.035	101,11
KODE REKENING	JENIS BELANJA	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	REALISASI (%)
5.1	BELANJA OPERASI	2.166.811.790.444	1.891.553.526.262	87,29
5.1.01	Belanja Pegawai	1.287.442.962.336	1.112.234.078.658	86,39
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	807.801.917.468	709.154.626.987	87,78
5.1.04	Belanja Subsidi	2.000.000.000	1.401.182.046	70,05
5.1.05	Belanja Hibah	62.066.260.640	61.684.838.571	99,38
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.500.650.000	7.078.800.000	94,37
5.2	Belanja MODAL	242.629.550.734	185.757.329.976	76,56
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	88.947.283.605	61.892.310.101	69,58
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	51.718.919.254	36.641.924.719	70,84
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	90.958.247.134	76.310.000.675	83,89
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.997.600.741	10.906.877.581	99,17
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	7.500.000	6.216.900	82,89
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	11.061.938.938	934.082.000	8,44
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	11.061.938.938	934.082.000	8,44
5.4	BELANJA TRANSFER	699.763.094.694	675.842.340.423	96,58
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	42.332.144.894	31.466.719.039	74,33
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	657.430.949.800	644.375.621.384	98,01
	JUMLAH BELANJA	3.120.266.374.810	2.754.087.278.661	88,26

5. Inovasi Daerah

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-6097 Tahun 2025 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2025 maka Kabupaten Klaten memperoleh skor Indeks Inovasi Daerah sebesar 83,49 dengan predikat Sangat Inovatif. Database Inovasi Daerah Kabupaten Klaten memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1.	Dinas Komunikasi dan Informatika	LAPOR MAS BUP	Aplikasi LAPOR MAS BUP merupakan inovasi layanan pengaduan masyarakat Pemerintah Kabupaten Klaten yang memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Keunggulan utama aplikasi ini adalah penggunaan notifikasi WhatsApp yang memungkinkan masyarakat menerima informasi status laporan secara real time, sehingga proses pelaporan menjadi lebih transparan dan mudah dipantau. Selain itu, aplikasi ini memiliki kebaruan melalui pemanfaatan Chat AI yang berfungsi membantu masyarakat dalam menyampaikan laporan, memberikan panduan awal, serta menjawab pertanyaan umum terkait mekanisme pengaduan. Fitur ini membuat layanan lebih responsif, efisien, dan dapat

			diakses kapan saja. Dengan integrasi notifikasi WhatsApp dan Chat AI, aplikasi Lapormas Bup memberikan nilai tambah dibandingkan layanan pengaduan konvensional serta menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Klaten dalam menghadirkan pelayanan publik yang modern dan inovatif. Lapormas Bup bisa diakses melalui website : lapormasbup.klaten.go.id
2.	Dinas Pendidikan	Sekolah Interaktif Terpadu (SIT)	Sekolah Interaktif Terpadu (SIT) adalah inovasi pendidikan yang ditujukan untuk menjadikan Sekolah Dasar Negeri lebih interaktif, berfokus pada penguatan karakter, budaya, religiusitas dan kualitas pembelajaran. Program ini diaplikasikan melalui model 6 Hari Sekolah yang memadukan pembelajaran akademik dengan berbagai Kegiatan pendukung di sekolah
3.	Dinas Kesehatan	Sehatku Bagas Waras	Aplikasi layanan kesehatan di RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten bagi pasien. Melalui aplikasi sehatku pasien dapat melakukan reservasi layanan, memperoleh informasi jadwal dokter dan ketersediaan kamar. Melalui aplikasi tersebut, pasien juga dapat memperoleh informasi rekam medis dalam bentuk pdf seperti riwayat diagnosis, resep, hasil laboratorium dan radiologi.
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	SIMANTARU (Sistem Informasi Pemanfaatan Penataan Ruang)	Sistem informasi basis data pemanfaatan ruang yang mampu mengumpulkan, menyimpan, mengintegrasikan, menampilkan, dan memeriksa data pemanfaatan ruang di Kabupaten Klaten serta mengintegrasikan data pemanfaatan ruang Kabupaten Klaten untuk menghindari perulangan dan tumpang tindih ajuan SITR dan KKPR dan sinkron dengan Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Klaten.
5.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	SIFASUM 2.0 (Sistem Informasi Umum)	SIFASUM 2.0 merupakan Sistem Informasi Fasilitas Umum yang dirancang untuk meningkatkan kualitas layanan publik dalam pengelolaan aset daerah oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Disperakim). Adapun fasilitas umum yang dapat diakses melalui sistem ini meliputi Gedung Grha Bung Karno (GBK), Gedung Sunan Pandanaran (RSPD) dan Alun-Alun Kabupaten. Melalui SIFASUM 2.0, masyarakat dapat melakukan pengecekan ketersediaan jadwal secara real-time, melakukan reservasi secara daring selama 24 jam, serta menyelesaikan pembayaran secara non tunai/online melalui

			berbagai kanal pembayaran yang tersedia. Sistem ini mendukung transparansi, kemudahan akses, dan efisiensi proses layanan secara menyeluruh. Dengan hadirnya SIFASUM 2.0, Disperakim berkomitmen menghadirkan layanan publik berbasis digital yang lebih modern, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat
6.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Layanan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskessos) di MPP dan di Kecamatan Berdaya	Puskessos merupakan Lembaga yang dibentuk untuk memudahkan warga miskin dan rentan miskin termasuk Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) untuk mendapatkan akses dan menjangkau layanan perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, baik yang dikelola oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, pemerintah Desa/kelurahan dan lembaga non-pemerintah. Puskessos juga menjadi wadah mewujudkan adanya sinergi berbagai potensi dan sumber daya masyarakat, memperkuat jaringan-jaringan sosial, dan membangun kebersamaan dalam mengatasi permasalahan sosial di tingkat lokal.
7.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Sistem Informasi Difabel (AKSIDIFA)	Sebuah platform berbasis web yang dikembangkan untuk mendata, mengelola, dan memetakan data penyandang disabilitas secara terpusat, dengan tujuan untuk mempermudah pemerintah dalam merencanakan, mengimplementasikan, dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas secara tepat sasaran. Aplikasi ini berfungsi untuk mencatat informasi penyandang disabilitas, potensi, hambatan yang mereka hadapi, mendukung perencanaan pembangunan inklusif di Klaten.
8.	Dinas Lingkungan Hidup	SIPUS (Sistem Informasi Pengurangan Sampah)	SIPUS merupakan aplikasi untuk mempermudah pendataan dan meningkatkan keakuratan data pengurangan sampah di Kabupaten Klaten. Aplikasi meliputi keakuratan dalam mengelola, memonitoring dan mengevaluasi pelaporan pengurangan sampah yang masuk ke TPS3R dan Bank Sampah di Kabupaten Klaten. Sehingga pendataan dan pelaporan pengurangan sampah di setiap wiayah dapat disampaikan dengan cepat, mudah dan real time. Pengguna aplikasi yaitu pengelola TPS3R dan bank sampah dapat setiap waktu melaporkan hasil pengurangan sampah yang telah dilakukan setiap harinya.
9.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Layanan Adminduk Jemput Bola Terintegrasi Desa	Inovasi pelayanan jemput bola administrasi kependudukan ke Desa/kelurahan dengan sistem

	Sipil		terjadwal dan berbasis data sasaran. Pada Tahun 2025 dilakukan pengembangan terutama bagi kelompok rentan, lansia, dan penyandang disabilitas, guna meningkatkan kepemilikan dokumen kependudukan
10.	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten.	Pembuatan Website sejarah dan budaya Kabupaten Klaten: museum.klaten.go.id	Website museum.klaten.go.id merupakan platform digital resmi yang menyajikan informasi sejarah, kebudayaan, serta koleksi museum di Kabupaten Klaten secara edukatif, informatif, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Website ini dikembangkan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan dokumentasi, pelestarian, dan diseminasi informasi sejarah serta budaya daerah secara modern, akurat, dan berkelanjutan. Website ini berfungsi sebagai sarana edukasi publik sekaligus media promosi yang menampilkan perjalanan dan perkembangan kebudayaan di wilayah Kabupaten Klaten. Melalui penyajian konten yang terstruktur dan berbasis data, museum.klaten.go.id diharapkan mampu meningkatkan literasi sejarah, memperkuat kesadaran budaya, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian warisan daerah.

Bupati Klaten



Hamenang Wajar Ismoyo